



Media: Merapi

Hari: Sabtu

Tanggal: 10 Agustus 2019

Halaman: 2

HOTEL NUNGGAK PAJAK RP 6,3 MILIAR

Walikota Bentuk Tim Percepatan Penagihan

UMBULHARJO (MERAPI) - Jumlah tunggakan pajak hotel di Kota Yogyakarta sejak tahun 2017 sampai tahun 2019 mencapai Rp 6,3 miliar. Untuk itu Pemkot Yogyakarta akan membentuk tim percepatan penagihan tunggakan pajak. Pembentukan tim sebagai tindak lanjut supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

Kasubag Pembukuan dan Pelaporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kota Yogyakarta RM Santoso Tri Irianta mengatakan, tunggakan Rp 6,3 miliar itu berasal dari 79 ketentuan pajak hotel yang diterbitkan pada tahun 2017, 2018 dan 2019. Jumlah tunggakan itu juga yang dilaporkan ke KPK. Sedangkan total wajib pungut pajak hotel di Kota Yogyakarta sekitar 600 hotel.

"Ada hotel yang nunggak pajak bisa tiga kali sejak 2017. Ada juga yang cuma satu kali. Baik hotel berbintang maupun hotel melati," kata Santoso di kantornya, Jumat (9/8).

Menurutnya, selain beban ketentuan pajak, hotel yang nunggak juga harus membayar denda 2 persen perbulan hingga maksimal denda 48 persen. Pihaknya selama ini sudah melakukan penagihan ke hotel-hotel yang menunggak menyeterkan pajak. Termasuk memberikan surat pemanggilan satu sampai tiga ke hotel-hotel yang menunggak pajak. "Kami sudah berupaya melakukan penagihan hingga pemanggilan satu sampai tiga. Tapi akhirnya cuma *dismayansi* (ditunda lagi)," ujarnya.

Sedangkan penindakan penertihan terhadap pelaku hotel yang menunggak pajak, menurutnya secara atura perda tidak kuat. Dicontohkan Satpol PP bisa bertindak jika penunggak sudah mendapatkan peringatan pertama sampai ketiga secara beruntun. Jika dalam masa peringatan, ada satu kewajiban yang ditunaikan, maka bisa mengugurkan proses penertiban.

"Kami juga belum bisa melakukan penagihan langsung karena belum ada perangkat untuk juru sita. Tapi kami akan berupaya menagih. Dengan supervisi KPK ini menjadi "peluru" baru ada gebrakan. Apapun respons dari wajib pungut pajak akan kami tulis dalam berita acara," papar Santoso.

Sementara itu Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengatakan akan membentuk tim percepatan penagihan tunggakan pajak. Tim akan dipimpin Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) dengan melibatkan or-

Instans

1. BPKAD
2. Satpol PP
3. DKMP
4. Diskominpda
5. _____

Netral
Segera
Untuk diketahui



Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti menyerahkan pisau sebagai alat bantu kepada petugas pemeriksa penyembelihan hewan kurban kemarin.

ganisasi perangkat daerah terkait di antaranya BPKAD, Satpol PP, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan serta Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian.

"Paling lambat minggu depan tim terbentuk. Akhir bulan harus tuntas dan semua tertagih. Pajak hotel ini kan sebenarnya sudah dibayarkan konsumen, hanya dititipkan dan harus disetorkan ke pemerintah," tandas Haryadi. (Tri-m)

Tindak Lanjut

- Untuk Ditanggapi
- Untuk Diketahui
- Jumpa Pers

Jepala

S.Sos, MM
NIP. 19090723499603 1 005

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP 2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan 3. BPKAD 4. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

